

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILUKADA SERENTAK 2024 BERDASARKAN UNDANG UNDANG PEMILUKADA (Studi Putusan Nomor:191/Pid.Sus/2024/PN Met)

**Oleh
Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid**

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 2024 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia yang menuntut penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran, khususnya yang melibatkan pejabat publik aktif yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Wakil Wali Kota Metro.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan hukum di lapangan, Serta didukung dengan wawancara Hakim, Bawaslu dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dengan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut pada prinsipnya belum mencerminkan tujuan pemidanaan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran Pemilukada. Karena sanksi yang dijatuhkan dinilai masih relatif ringan sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku maupun pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.

Saran penelitian diharapkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk memperbaharui terkait Undang-Undang Pemilukada agar penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada ke depan lebih memperhatikan aspek tujuan pemidanaan secara proporsional, khususnya dalam menciptakan efek jera dan pencegahan umum.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pemilukada, Tujuan Pemidanaan.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN THE 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL HEAD ELECTION CRIMES BASED ON THE REGIONAL HEAD ELECTION LAW (A Study Of Decision Number: 191/Pid.Sus/2024/PN Met)

By

Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid

The 2024 Simultaneous Regional Head Elections (Pemilukada) are a manifestation of popular sovereignty in Indonesia's democratic system, which demands honest, fair, and integrity-based elections. However, in practice, various violations are still found, particularly those involving active public officials who abuse their official authority for electoral gain. This study aims to analyze the application of criminal sanctions in the Metro District Court Decision Number 191/Pid.Sus/2024/PN Met, which imposed criminal sanctions on the Deputy Mayor of Metro.

The research methods used in this thesis are normative and empirical juridical methods. The normative juridical approach is carried out through a statutory approach and a case approach by examining applicable legal provisions and court decisions that are the object of the research. The empirical juridical approach is carried out to obtain a factual picture of the application of law in the field. This is also supported by interviews with judges, Bawaslu (Elections Supervisory Agency), and academics from the Faculty of Law, University of Lampung.

The research results show that the imposition of criminal sanctions by imposing fines on the defendants does not, in principle, reflect the objectives of criminal punishment, particularly in terms of law enforcement and preventing election violations. Because the sanctions imposed are considered relatively light, they do not provide an optimal deterrent effect on the perpetrators or other parties who have the potential to commit similar violations.

Research suggestions are expected for the executive and legislative institutions to update the Regional Election Law so that the provisions on criminal sanctions in future Regional Election crimes pay more attention to the aspect of the objectives of proportional punishment, especially in creating a deterrent effect and general prevention.

Keywords: Application of Criminal Sanctions, Regional Head Election Crimes, Objectives of Punishment